

AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN KUALITAS INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI KALIMANTAN BARAT

Hurian Kamela

Universitas Terbuka

Email : hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Masih terbatasnya penelitian yang membahas pandangan masyarakat mengenai akuntabilitas, kualitas informasi di lingkup Kalimantan Barat menjadi hal utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana kepuasan masyarakat di Kalimantan Barat terpengaruh oleh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kualitas informasi berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Kuesioner dibagikan kepada pihak yang tertarik atau terlibat dengan laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 162 orang 4 bulan (Oktober 2024 sampai Januari 2025). Metode purposive sampling digunakan untuk memilih sampel penelitian. Responden terdiri dari masyarakat yang beragam di Kalimantan Barat. Analisis regresi berganda dan uji moderasi dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti bahwa semakin transparan dan akuntabel laporan keuangan pemerintah daerah, semakin puas masyarakat dengan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas informasi memoderasi hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan dan kepuasan masyarakat. Jika informasi yang diberikan lebih akurat, relevan, mudah dipahami, dan dapat diakses, maka hubungan antara akuntabilitas dan kepuasan masyarakat menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika informasi yang diberikan kurang berkualitas, hubungan antara akuntabilitas dan kepuasan masyarakat menjadi lebih lemah. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan kualitas informasi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kata kunci : Akuntabilitas; Masyarakat; Informasi

ABSTRACT

Limited research still discusses public views regarding accountability; the quality of information in West Kalimantan coverage is the main thing. This research aims to study how community satisfaction in West Kalimantan is influenced by the financial accountability of local government reports and the quality of information functions as a moderating variable in this relationship. This research uses a quantitative approach with survey methods. The questionnaire was published to parties interested or involved in local government financial reports as many as 162 people for 4 months (October 2024 to January 2025). The purposive sampling method was used to select the research sample. Respondents consisted of diverse communities in West Kalimantan. Multiple regression analysis and moderation tests were conducted based on the data obtained. The research results show that the accountability of local government financial reports positively and significantly influences community satisfaction. This means that the more transparent and accountable the regional government's financial reports are, the more satisfied the public will be with the performance of the regional government. This research proves that information quality moderates the relationship between financial report accountability and public satisfaction. If the information provided is more accurate, relevant, easy to understand and accessible, then the relationship between accountability and community satisfaction

becomes stronger. Conversely, the relationship between accountability and public satisfaction becomes weaker if the information is poor quality. The results show that increasing transparency and quality of information in regional financial management is crucial to increasing public trust and satisfaction with regional government.

Keywords : Accountability; Society; Information

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat adalah bagian penting dari pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana keuangan pemerintah daerah dikelola adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat dengan akuntabilitas yang tinggi. Ini membantu pembangunan daerah dan pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah daerah Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab strategis untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penerima program pemerintah, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang akuntabel sangat penting untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Wijayanti and Angga 2024).

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Jika laporan keuangan disusun dengan prinsip akuntabilitas yang baik, masyarakat akan lebih percaya terhadap pemerintah dan percaya bahwa kebijakan yang dibuat dibuat dengan cara yang adil dan tidak bias. Sebaliknya, laporan keuangan yang tidak transparan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat (Santi, Siswadi, and Rahayu 2024). Hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan dan kepuasan pelanggan dapat dimoderasi oleh kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang akurat, relevan, dapat diandalkan, dan mudah dipahami akan meningkatkan transparansi dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kondisi keuangan daerah (Wibowo & Susliyanti 2024). Kualitas informasi menentukan seberapa baik laporan keuangan diterima dan dipahami oleh masyarakat. Laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas tinggi masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kalimantan Barat. Sumber daya manusia terbatas dalam penyusunan laporan keuangan, pemahaman masyarakat yang buruk tentang laporan keuangan, dan rendahnya aksesibilitas terhadap informasi keuangan daerah adalah beberapa tantangan yang sering

muncul (Setyadi et al. 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan peningkatan kualitas laporan keuangan.

Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk membangun sistem pelaporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi informasi public (Kardina, Frinaldi & Putri 2024). Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas informasi yang disajikan, standar akuntansi pemerintahan yang baik dan penggunaan teknologi informasi dalam penyajian laporan keuangan dapat membantu. Selain itu, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mendorong peningkatan akuntabilitas laporan keuangan di tingkat daerah. Pemerintah pusat dapat memastikan bahwa setiap pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Barat, menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab melalui peraturan dan mekanisme pengawasan yang ketat. Untuk tujuan strategis, inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyarankan cara memperbaiki penyajian laporan keuangan daerah. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peran kualitas informasi sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan dan kepuasan masyarakat. Diharapkan penelitian ini akan membantu meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kedepannya diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menyajikan laporan keuangan. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus berkembang, sehingga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan situasi ini, penelitian ini tidak hanya relevan tetapi dapat menjadi acuan untuk kedepannya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, lembaga akademik, dan masyarakat umum memahami dan meningkatkan praktik akuntabilitas keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Prinsip akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan peraturan akuntansi pemerintahan harus disediakan dan diakses oleh publik dan pihak berkepentingan oleh pemerintah daerah (Aulia et al. 2024). Tujuan dari akuntabilitas ini untuk menjamin bahwa anggaran yang dikelola digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Didasarkan pada kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting. Laporan keuangan yang jelas dan dapat dipercaya membantu masyarakat menilai bagaimana pemerintah membelanjakan uang publik. Selain itu, laporan keuangan yang akuntabel membantu pemerintah menemukan dan mengatasi penyimpangan anggaran, yang mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah komponen utama dari laporan ini. Masing-masing komponen ini memberikan gambaran lengkap tentang situasi keuangan daerah, yang mencakup pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas pemerintah selama periode pelaporan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menjalani audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan. Tujuan audit ini adalah untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan dan menilai pemerintah daerah telah mematuhi peraturan yang berlaku. Hasil audit BPK sering kali menjadi dasar untuk opini tentang laporan keuangan, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, atau bahkan Disclaimer, yang berarti tidak memberikan opini. Opini yang diberikan menunjukkan seberapa bertanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan. Tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah dapat menjalankan anggaran dengan transparan dan bertanggung jawab, masyarakat akan lebih percaya pada kebijakan yang dibuat. Tingkat akuntabilitas yang tinggi juga dapat meningkatkan daya tarik investasi dan bantuan dari lembaga donor dan pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah harus terus memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan sistem

pengawasan, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran.

Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah menunjukkan bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan, mengelola sumber daya, dan memenuhi kebutuhan warga. Jika masyarakat tidak puas, akan ada perubahan kepercayaan kepada pemerintah dengan harapan mendukung kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengembangkan kebijakan yang meningkatkan kualitas layanan dan keterbukaan. Layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan komponen utama yang mempengaruhi kepuasan masyarakat (Ibrahim, Blongkod, & Rasjid 2024). Orang-orang akan lebih bahagia jika menerima pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan ramah. Mayoritas orang menentukan aspek-aspek penting seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan infrastruktur. Tingkat kepuasan akan meningkat jika pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas yang memadai dan memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah faktor penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat selain kualitas layanan. Masyarakat merasa lebih dihargai dan terlibat dalam proses pemerintahan ketika ada keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan program pembangunan. Adanya sistem pengaduan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan membuat warga percaya pada pemerintah. Kepuasan publik dapat diukur berdasarkan seberapa responsif pemerintah daerah terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Jika pemerintah cepat menangani dan menangani masalah warga menjadi lebih dihormati dan dipercaya. Misalnya, pemerintah daerah harus segera mengatasi masalah seperti banjir, infrastruktur yang rusak, atau layanan kesehatan yang kurang memadai untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah memengaruhi citra pemerintah dan efektivitas pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan kinerja, transparansi, dan keterbukaan dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan agar masyarakat yang puas dapat bekerja sama dalam program pembangunan, baik dalam bentuk partisipasi langsung maupun dukungan sosial.

Kualitas Informasi

Informasi pemerintah daerah yang baik sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah harus akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan informasi yang baik, masyarakat dapat memahami kebijakan, program, dan anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya (Wahyu & Juandi 2024). Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Informasi pemerintah daerah harus akurat dan jelas karena data harus valid, dapat diverifikasi, dan tidak diubah. Misalnya, pemerintah harus menyajikan angka yang sesuai dengan fakta di lapangan dalam laporan keuangan daerah atau data proyek pembangunan. Kesalahan atau ketidakakuratan informasi dapat membuat orang tidak percaya satu sama lain dan bahkan dapat menyebabkan konflik sosial. Selain keakuratan, kemudahan akses ke informasi merupakan komponen penting dalam mengevaluasi kualitas informasi pemerintah daerah. Semua orang harus dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baik melalui media sosial, situs web resmi pemerintah, maupun layanan informasi public (Karundeng & Maulana 2024). Harus ada pemberian informasi dalam format yang mudah dipahami, seperti infografis atau laporan digital, dapat membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa data dapat diakses oleh semua orang, termasuk yang memiliki keterbatasan teknologi. Selain itu, indikator kualitas informasi yang baik adalah relevansi dan ketepatan waktu penyampaiannya. Pemerintah daerah harus memberikan informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi, masyarakat perlu mendapatkan informasi tentang bantuan sosial dan tindakan penanggulangan segera. Informasi yang lambat atau tidak diperbarui secara berkala dapat menghambat respons masyarakat dan merusak kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan memperkuat sistem pengelolaan data, meningkatkan keterbukaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Ini karena masyarakat dapat lebih aktif dalam memberikan masukan dan mengawasi jalannya pemerintahan ketika memiliki informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses.

Hipotesis

Kepuasan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat berpengaruh positif dan signifikan jika laporan keuangan pemerintah daerah akuntabel. Akuntabilitas berdasarkan pada kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan transparan. Laporan yang baik akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana anggaran daerah digunakan, sehingga orang-orang dapat menilai apakah dana publik digunakan dengan cara yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah berkorelasi positif dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Ketika masyarakat merasa bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan baik lebih percaya dan puas terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Karundeng and Maulana 2024). Sebaliknya, ketidakjelasan atau kesalahan dalam laporan keuangan dapat menyebabkan ketidakpercayaan. Secara lebih khusus, hipotesis ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kepuasan masyarakat Kalimantan Barat dipengaruhi oleh akuntabilitas laporan keuangan. Untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat, hal-hal seperti informasi anggaran yang jelas, audit BPK, dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran sangat penting (Syifa & Anggraini 2024). Jika temuan penelitian menunjukkan korelasi yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan benar-benar berperan dalam membangun kepercayaan dan kebahagiaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

H1: Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kepuasan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat dipengaruhi oleh kualitas informasi. Dalam kasus ini, kualitas informasi merujuk pada seberapa baik informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dipahami, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat. Informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses akan memperkuat hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan dan tingkat kepuasan masyarakat, karena masyarakat akan lebih mudah menilai kinerja pemerintah berdasarkan apa yang dimiliki (Andayani,

Zitri, & Darmansyah 2024). Masyarakat memahami dan menanggapi laporan keuangan menunjukkan pengaruh kualitas informasi sebagai variabel moderasi. Misalnya, meskipun laporan keuangan akuntabel, masyarakat mungkin tidak memahami sepenuhnya penggunaan anggaran daerah jika informasinya terlalu teknis, sulit dipahami, atau tidak relevan. Sebaliknya, jika informasinya lebih transparan dan mudah dipahami, masyarakat akan lebih menghargai upaya pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Kualitas informasi yang tinggi memperkuat hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kepuasan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Kualitas informasi dalam konteks ini mencakup aspek-aspek seperti kejelasan, ketepatan waktu, dan kemudahan akses informasi terkait laporan keuangan. Jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mudah dipahami, lengkap, dan transparan, masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah daerah, sehingga memperkuat dampak positif dari akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepuasan (Tabupook &* Wulandari 2024). Ketika kualitas informasi tinggi, masyarakat akan lebih mampu menilai anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan yang dijanjikan dan dialokasikan untuk pembangunan. Informasi yang mudah dipahami dan tidak membingungkan akan memudahkan masyarakat dalam menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Dalam hal ini, akuntabilitas laporan keuangan yang baik, yang dipadukan dengan kualitas informasi yang tinggi, akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan pemerintah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Kualitas informasi yang tinggi, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih efektif. Masyarakat yang mendapatkan informasi yang tepat dan mudah diakses akan merasa lebih dihargai dan lebih terlibat dalam proses pemerintahan. Oleh karena itu, hipotesis ini menguji apakah kualitas informasi yang tinggi dapat memperkuat pengaruh positif akuntabilitas laporan keuangan terhadap kepuasan masyarakat di Kalimantan Barat. Jika hipotesis ini benar, maka menunjukkan bahwa peningkatan kualitas informasi yang disampaikan pemerintah daerah dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat (Aprilla 2024).

Sumber daya informasi membantu menjelaskan dan memperkuat hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan dan kepuasan masyarakat. Jika pemerintah daerah memberikan informasi yang berkualitas, masyarakat akan lebih puas dengan pengelolaan keuangan daerah, meskipun ada perbedaan pendapat tentang tingkat akuntabilitas yang ada. Oleh karena itu, hipotesis ini menguji kualitas informasi dapat mempengaruhi dampak dari akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Kalimantan Barat.

H2: Kualitas informasi memoderasi pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kepuasan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

Kerangka

Kerangka penelitian ini yaitu pada gambar 1 (di halaman tabel belakang) dengan penjelasan yaitu (1) Akuntabilitas Laporan Keuangan (AL) sebagai Variabel Independen, (2) Kepuasan Masyarakat (KM) sebagai Variabel Dependen, dan Kualitas Informasi (KI) sebagai Variabel Moderasi.

Rumusan Penelitian

Berdasarkan variabel penelitian didapatkan 2 rumusan yaitu:

Sebelum Moderasi

$$KM_{it} = \alpha + AL\beta_{1it} + KI\beta_{1it} + e_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Setelah Moderasi

$$KM_{it} = \alpha + AL\beta_{1it} * KI\beta_{1it} + e_{it} \dots\dots\dots (2)$$

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan survei sebanyak 162 orang yaitu penduduk di wilayah Kalimantan Barat selama 4 bulan (Oktober 2024 sampai Januari 2025). Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kepuasan masyarakat serta bagaimana kualitas informasi memoderasi hubungan tersebut, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan pendekatan deskriptif dan korelasional. Variabel penelitian ini yaitu variabel independen (x) diberi kode “AL” yaitu akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor seperti transparansi, konsistensi, dan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi pemerintah dapat digunakan untuk mengukur kualitasnya, variabel dependen (y) diberi kode “KM” yaitu kepuasan masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dan hasil laporan keuangan dapat diukur melalui wawancara atau survei.

Selanjutnya, untuk variabel pemoderasi (z) diberi kode “KI” yaitu kualitas informasi laporan keuangan bahwa informasi harus jelas, tepat, lengkap, dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Tabel 1 menjelaskan jumlah sampel penelitian berdasarkan gender yaitu laki-laki (67 orang) dan perempuan (95 orang). Hal ini dapat memberikan bukti bahwa perempuan lebih mendominasi penelitian ini sebesar 41,36% (laki-laki) dan 58,04% (perempuan). Hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa partisipasi perempuan lebih dominan dalam hasil penelitian karena lebih dari 50%. Tabel 2 menjelaskan umur pada penelitian ini. Jumlah responden dibagi menjadi empat cluster yaitu <17 tahun berjumlah 0 orang, 17-25 tahun sebanyak 54 orang (33,3%), 26-35 tahun sebanyak 92 orang (56,79%), >35 tahun sebanyak 16 orang (9,91%). Hal ini memberikan penjelasan bahwa range umur yang paling banyak adalah 26-35 tahun sebanyak 92 orang (56,79%) lebih dari 50% sehingga mewakili responden secara keseluruhan. Tabel 3 menjelaskan tempat tinggal responden yang tersebar di Kota dan kabupaten wilayah Kalimantan Barat, berdasarkan jumlah yang paling banyak adalah (1) Pontianak sebanyak 65 orang (40,12%), (2) Singkawang 49 orang (30,24%) dan Kapuas 19 orang (11,72%). Sedangkan yang tersedikit adalah (1) Nanga Pinoh 2 orang (1,23%), (2) Kapuas 1 orang (0,61%) dan Sekadau Hilir 1 orang (0,61%). Hal ini memberikan bukti bahwa Kota besar seperti Pontianak dan Singkawang menjadi sumber responden terbanyak dibandingkan kota lainnya.

Tabel 4 menjelaskan pekerjaan responden yaitu ASN berupa pegawai pemerintah PNS/ PPPK sebanyak 72 orang (44,44%), swasta 46 orang (28,39%) dan terendah adalah lain-lain 11 orang (6,79%). Tabel 5 menjelaskan statistik deskriptif nilai mean tertinggi adalah Akuntabilitas Laporan Keuangan (AL) yaitu 4.922733 dan Kualitas Informasi (KI) yaitu 4.826262. Skor nilai minimum adalah 4 dan nilai maksimum adalah 5. Tabel 6 menjelaskan hasil penelitian sebelum moderasi. Berdasarkan hasilnya bahwa hipotesis 1 diterima dengan nilai 0.042. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Setyadi et al. (2024), hal ini membuktikan (1) Akuntabilitas laporan keuangan sudah dianggap sesuai pada pemerintah daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab mengenai anggaran kedepannya. Akuntabilitas laporan keuangan dievaluasi berdasarkan standar akuntansi pemerintah, peraturan terkait, dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2) Adanya kepuasan

masyarakat mengenai pelayanan yang efektif dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Anggaran dianggap sudah digunakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan publik. (3) Tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan memiliki hubungan positif bahwa peningkatan akuntabilitas laporan keuangan akan meningkatkan kepuasan masyarakat, hubungan signifikan karena kepuasan masyarakat di daerah sangat bergantung pada kualitas pemerintahan yang baik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Sari & Fuadi 2024).

Tabel 7 menjelaskan hasil penelitian setelah moderasi. Berdasarkan hasilnya bahwa hipotesis 2 diterima dengan nilai 0.037. Hal ini sesuai dengan penelitian (Santi et al. 2024). Berdasarkan tersebut, hal ini membuktikan (1) Kepuasan masyarakat dan akuntabilitas laporan keuangan yaitu adanya kepuasan bahwa anggaran dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan publik, kinerja pemerintah daerah dianggap sudah maksimal karena laporan keuangan yang akurat menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan sesuai dengan peraturan (Nuzulla, Maslichah, & Sari 2024). (2) Kualitas informasi berdasarkan keakuratan, relevan, mudah dipahami, tepat waktu, dan dapat diandalkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh akuntabilitas terhadap kepuasan masyarakat akan semakin besar jika informasi keuangan disajikan dengan jelas dan transparan. Sebaliknya, jika informasi kurang jelas, seperti sulit dipahami atau tidak lengkap, masyarakat mungkin tetap tidak puas meskipun pemerintah daerah dianggap bertanggung jawab. Kualitas informasi dalam penelitian ini memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kepuasan masyarakat. (3) Jika laporan keuangan pemerintah daerah jelas dan mudah diakses, maka akuntabilitas laporan keuangan akan berdampak lebih besar pada kepuasan masyarakat. Namun, jika informasi tidak jelas atau tidak transparan, masyarakat mungkin sulit memahami bagaimana anggaran dikelola, sehingga kepuasan masyarakat tidak akan meningkat secara signifikan meskipun akuntabilitas tinggi. Transparansi dan akuntabilitas akan lebih dihargai oleh masyarakat jika informasi berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebaliknya, jika informasi berkualitas rendah, hubungan antara akuntabilitas dan kepuasan masyarakat akan lebih lemah. Tabel 8 menjelaskan skor VIF bahwa KI sebesar 1.8364 dan AL sebesar 1.7463. Hal ini menunjukkan bahwa

penelitian ini bebas multikolinearitas karena nilainya dibawah 10, sehingga membuktikan sudah memenuhi standar.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dan tingkat kepuasan masyarakat di Kalimantan Barat. Hasil analisis, yang dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif, menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang jelas dan jujur membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat meningkat jika laporan keuangan pemerintah daerah lebih akuntabel. Ini karena masyarakat merasa lebih percaya dan puas terhadap pemerintah daerah yang dapat menyajikan laporan keuangan secara jelas, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sebaliknya, jika laporan keuangan pemerintah daerah kurang akuntabel, masyarakat cenderung merasa tidak puas karena ketidakjelasan dalam pengelolaan anggarannya.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kualitas informasi juga berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan dan kepuasan masyarakat. Dampak akuntabilitas terhadap kepuasan masyarakat menjadi lebih besar ketika informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah berkualitas tinggi bahwa informasi itu akurat, relevan, mudah diakses, dan disajikan dengan jelas, namun kualitas informasi rendah, hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan dan kepuasan masyarakat. Pentingnya meningkatkan transparansi dan kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari penelitian ini. Pemerintah daerah di Kalimantan Barat harus lebih proaktif dalam menyajikan laporan keuangan mereka dalam format yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, mereka harus meningkatkan aksesibilitas publik terhadap informasi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran juga perlu diperkuat.

Meskipun penelitian ini menghasilkan hasil yang signifikan, ada beberapa keterbatasan. Karena penelitian ini hanya membahas daerah Kalimantan Barat, hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan ke daerah lain di Indonesia. Selain itu, walaupun

penelitian ini hanya mempertimbangkan kualitas informasi sebagai variabel moderasi, komponen lainnya, contohnya variabel mengenai literasi keuangan masyarakat dan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran, juga dapat mempengaruhi hubungan antara akuntabilitas laporan keuangan dan kepuasan masyarakat. Keterbatasan penelitian bahwa perkembangan penelitian dapat dikembangkan dengan cakupan yang luas misalnya level nasional. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan faktor tambahan seperti efektivitas pengawasan keuangan, transparansi kebijakan fiskal, dan peran teknologi dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hasil penelitian yang lebih mendalam diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sehingga masyarakat secara keseluruhan lebih puas.

PENGHARGAAN/UCAPAN TERIMA KASIH

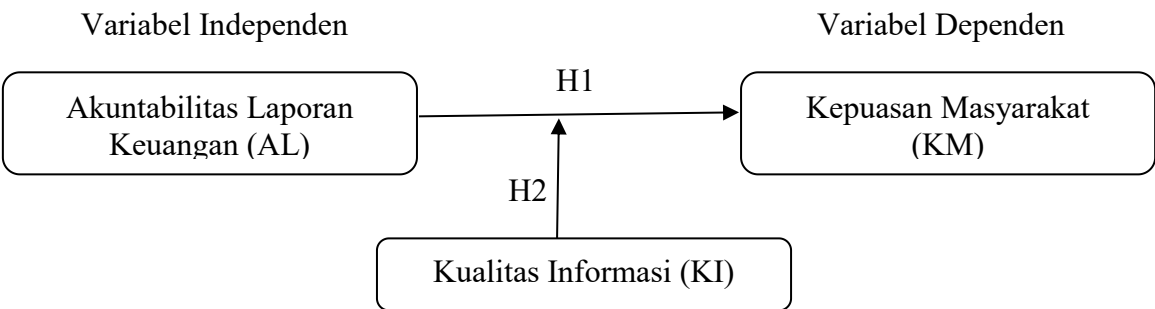
Terima kasih kepada masyarakat, teman-teman yang berada pada wilayah Kalimantan Barat yang sudah bersedia untuk menjadi responden penelitian ini, serta Universitas Terbuka sebagai tempat homebase saya mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Safirah, Ilham Zitri, and Darmansyah. 2024. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kelurahan Punia Kota Mataram NTB." *Journal Law and Government* 2(1):8–19.
- Aprilla, Soraya Putri. 2024. "EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) SEBAGAI KATALIS PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR BEA CUKAI YOGYAKARTA." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7(4):16641–48.
- Aulia, Yurika, Universitas Pembangunan, Panca Budi, Deana Sari, Br Hasibuan, Universitas Pembangunan, Panca Budi, Hetri Waruwu, Universitas Pembangunan, Panca Budi, Priska Devriski Gulo, Universitas Pembangunan, Panca Budi, Silvia Nurhaliza, Universitas Pembangunan, and Panca Budi. 2024. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG." *Journal of Student Research (JSR)* 2(2):79–86.
- Ibrahim, Gabriela, Harun Blongkod, and Herlina Rasjid. 2024. "Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo)." *SEIKO: Journal of Management & Business* 7(2):951–76.
- Kardina, Mutia, Aldri Frinaldi, and Nora Eka Putri. 2024. "Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Di Indonesia." *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik* 11(2):615–20.
- Karundeng, Esterlita H., and Aviandi Okta Maulana. 2024. "Pengaruh Kepemimpinan

- Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas: Studi Kasus Pada Kabupaten Sleman.” *ABIS: Accounting and Business Information Systems* 12(2):16–26.
- Nuzulla, Natasya Firda, Maslichah, and Arista Fauzi Kartika Sari. 2024. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Di Kec. Kunjang, Kab. Kediri).” *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 13(02):18–29.
- Santi, Yani Eka, Usep Siswadi, and Mike Mega Rahayu. 2024. “Pengaruh Pandangan Publik Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak.” *Studia Akuntansi* 12(1):1–8.
- Sari, Selly Puspita, and Fauzan Fuadi. 2024. “PENGARUH SPIP DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH: APAKAH CHANGE MANAGEMENT DAN PERGANTIAN KEPEMIMPINAN MAMPU MEMODERASI?” *AKURASI: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 7(2):383–406.
- Setyadi, Elok Heniwati, Umiaty Hamzani, Gita Desyana, and Djunita Permata Indah. 2024. “Pengaruh Kompetensi , Profesionalisme Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi.” *Sebatik* 28(2):587–96. doi: 10.46984/sebatik.v28i2.2493.
- Syifa, and Dahlia Tri Anggraini. 2024. “Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Pembayaran Zakat Muzaki Dengan Aksesibilitas Sebagai Pemoderasi.” *Syifa Dahlia Tri Anggraini* 5(1):39–55.
- Tabupook, Alvi Angelica, and Ika Wulandari. 2024. “PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERITAH DAERAH.” *JIMEA Urnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 8(3):2395–2407.
- Wahyu, Muhammad, and Miftah Juandi. 2024. “PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM KEUANGAN DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA.” *MANAJEMEN INOVASI* 2(21):291–300.
- Wibowo, Anang Tri, and Eni Dwi Susliyanti. 2024. “PENGARUH TRANSPARANSI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.” *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi* 4(2):282–91. doi: 10.55587/jla.v4i1.116.
- Wijayanti, Selly, and P. Angga. 2024. “Determinasi Kualitas Audit Internal Pemerintah Daerah Dengan Integritas Auditor Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 7(2):151–64. doi: 10.35326/jiam.v7i2.6411.

TABEL DAN GAMBAR



Gambar 1. Kerangka Penelitian
Sumber: Dikembangkan dari (Santi et al. 2024)

Tabel 1. Gender

Jumlah Sampel Gender Penelitian	
Laki-laki	67
Perempuan	95
Total	162

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2. Umur

Sebaran Umur	
<17 tahun	0
17-25 tahun	54
26-35 tahun	92
>35 tahun	16

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 3. Lokasi

Lokasi Tempat Tinggal	
Pontianak	65
Singkawang	49
Kapuas	19
Sintang	10
Mempawah	7
Sambas	5
Bengkayang	3
Nanga Pinoh	2
Kapuas	1
Sekadau Hilir	1

Tabel 4. Pekerjaan

Pekerjaan Responden	
ASN	72
Swasta	46
Wirausaha	33
Lain-lain	11

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 5. Statistik Deskriptif
Skor Statistik

Var.	Obs.	Mean	Std.Dev	Min	Max
KI	162	4.826262	.3758483	4	5
AL	162	4.922733	.3002810	4	5
KM	162	4.102823	.3749393	4	5

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 6. Hasil (Sebelum Moderasi)
Hasil

Var.	Coef.	t	P>t	Sig.	Res.
KI	-.001793482	-0.01	0.042	H1 (+)	Effect
AL	-.001909233	-1.85.	0.030		
KM	6.8922545	36.11	0.000		

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 7. Hasil (Setelah Moderasi)
Hasil

Var.	Coef.	t	P>t	Sig.	Res.
KI	-.001826514	-0.02	0.037	H2 (+)	Effect
AL	-.001629030	-1.63.	0.024		
KM	6.7162893	38.14	0.000		

$R\text{-Squared} = 0.01528$

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 8. VIF
VIF

KI	1.8364
AL	1.7463
Mean VIF	1.79135

$R\text{-Squared} = 0.01528$

Sumber: Data diolah (2025)